

**IMPLIKASI RIVALITAS AMERIKA SERIKAT – REPUBLIK RAKYAT CHINA
 TERHADAP POSISI KEDAULATAN INDONESIA
 (Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)**

Rendy Adiwilaga¹, Prasta Kusumah², Mustabsyirotul Ummah Mustofa³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran

Email: rendyadwilaga@gmail.com¹; prastaobet88@gmail.com²; mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id³

Submitted: 17-01-2023; Accepted: 27-03-2023; Published : 28-03-2023

ABSTRAK

Pasca usainya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal yang tersisa diramalkan menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi global selama beberapa dekade setelahnya. Namun, internalisasi dan konsolidasi matang RRC sejak dekade 1970-an nyatanya pelan-pelan mematahkan asumsi AS sebagai adidaya tunggal. Perlahan bahkan China menggeser AS sebagai poros utama ekonomi dunia seiring dinamika politik internal AS yang kurang begitu stabil selama beberapa dasawarsa terakhir. Kedua negara tersebut bahkan dalam beberapa kesempatan secara terbuka memperlihatkan ketegangan akibat gesekan-gesekan diplomatik dan perebutan hegemoni di wilayah-wilayah konflik. Salah satu *hotspot* yang juga menjadi arena pertarungan kedua negara ini ialah klaim wilayah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menjadi “komoditi” strategis karena banyak menyimpan cadangan mineral besar serta sumber kekayaan laut yang melimpah, sehingga klaim wilayah banyak melibatkan negara-negara sekitar seperti halnya China, Vietnam, Thailand, dan beberapa wilayah satelit termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu wilayah yang menjadi *Choke Point* dua samudera besar yakni Hindia dan Pasifik juga menjadi salah satu negara yang terdampak akibat memanasnya ketegangan dua negara tersebut. Pada akhirnya, *proxy war* di berbagai bidang menjadi implikasi yang paling berdampak jika konflik dua negara besar tersebut terus memanjang selama beberapa tahun ke depan.

Kata Kunci: Implikasi, Rivalitas AS-Cina, Kedaulatan Indonesia, Klaim Wilayah

ABSTRACT

After the end of the cold war and the collapse of the Soviet Union, the United States as the sole remaining power was predicted to be the only power that dominated global political and economic power for decades afterwards. However, the internalization and consolidation of the PRC since the 1970s in fact slowly broke the assumption of the US as the sole superpower. Slowly, China has even shifted the US as the main axis of the world economy as the US internal political dynamics have been less stable over the past few decades. The two countries have even on several occasions openly shown tensions due to diplomatic friction and the struggle for hegemony in conflict areas. One hotspot that has also become an arena for the two countries to fight is the South China Sea claim. The South China Sea has become a strategic "commodity" because it holds large mineral reserves and abundant marine resources so many territorial Indonesia as one of the regions that are the Choke Point of two large oceans, namely the Indian and Pacific, is also one of the countries affected by the heating up of tensions between the two countries. At the end, proxy war becomes the most impactful implication in all aspects if the conflict between the two major countries continues to extend over the next few years.

Keywords: Implications, US-China Rivalry, Indonesian Sovereignty, Territorial Claims

PENDAHULUAN

Perang Dingin sejatinya menjadi *turning point* bagi Amerika Serikat dalam rangka menegaskan posisinya pada pergaulan internasional sebagai negara hegemonik yang paling dominan di abad modern. Keruntuhan Uni Soviet pasca kepemimpinan Mikhail Gorbachev di penghujung millenium, semakin menegaskan posisi tersebut. Sehingga sarjana-sarjana terkemuka termasuk di dalamnya Francis Fukuyama, percaya diri berpendapat bahwa Amerika Serikat merupakan “*the last man*” dalam peradaban akhir manusia.

Namun, pelan tetapi pasti, China memulai konsolidasi terstrukturnya pada pertengahan tahun 1970. Konsolidasi tersebut dimulai dari masa kepemimpinan Den Xiaoping (1978-1989). Xiaoping menjalankan kebijakan satu negara dua sistem (*Yi Guo Liangce*), dimana sistem kapitalis di bidang ekonomi, berdampingan dengan sistem politik sosialis. Per Maret 1984, Deng Xiaoping memanfaatkan UKM (usaha kecil menengah) serta bisnis swasta daerah untuk menopang perekonomian Cina, yang kemudian dikenal dengan *Township and Village Enterprises* (TVEs). *Township and Village Enterprises* merupakan program yang diusung Deng Xiaoping dengan melibatkan daerah bahkan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi. Peran dari pemerintah adalah mendukung serta membiayai dengan cara pemberian pinjaman kepada pelaku bisnis. Sebagai bukti pemerintah Cina mendukung program TVEs, maka setiap tahunnya diberikan pelatihan kepada 200.000 pemuda desa berupa satu atau dua teknik yang dapat diterapkan di daerahnya, Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah Cina juga bekerja sama dengan lembaga riset baik di tingkat pusat maupun daerah untuk terus mengembangkan teknologi yang kemudian akan dipakai di pedesaan ataupun oleh industri rumahan. (Mantolas, 2016). Seiring perkembangannya, Cina sebagai sebuah negara berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kompromi ideologi mampu melontarkan Cina masuk pada deretan negara-negara dengan perkembangan ekonomi dunia yang mumpuni.

Perlahan pula, Cina mulai aktif di *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001, menyusul manuvernya di Asia Tenggara pada tahun 2004 dengan menggandeng ASEAN untuk membentuk CAFTA (*China Asean Free Trade*

Area), menyusul kemudian kerjasama perdagangan bebas lainnya dengan Uni Eropa, Australia, termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Implikasinya, dalam periode 2015-2017, Cina tumbuh menjadi salah satu aktor utama yang paling menentukan dalam aliran investasi global. Jelas ini merupakan preseden buruk bagi eksistensi AS sebagai negara adidaya.

Hubungan antara AS dan Cina mulai memanas. Konfrontasi dari masing-masing pemimpin serta aksi nyata dalam gesekan ekonomi, jelas berimbas pada konstelasi ekonomi dunia secara keseluruhan. Perang dingin jilid II bahkan mulai disuarakan oleh berbagai pakar. Namun perlu diketahui, Cina saat ini jauh lebih kuat ketimbang Uni Soviet yang pada saat mencapai *peak level* ekonominya di masa perang dingin, PDB nya hanya sebesar 40% PDB Amerika Serikat (Nainggolan, 2013). Cina saat ini, jauh melampaui persentase tersebut dan bahkan mulai mendekati Raihan PDB Amerika Serikat, setelah berhasil melangkahi PDB Jepang di posisi ketiga dunia.

Melonjaknya prestasi Cina pada dekade sebelumnya, diikuti oleh penurunan produktifitas AS di bidang ekonomi. Pada tahun 2016, AS mengalami krisis keuangan yang sangat besar akibat hutang AS tahun 2015 yang mencapai US\$ 62 Triliun (855.000 Triliun dalam kurs rupiah) dimana hutang tersebut jatuh tempo pada tahun 2016. Sayangnya, 80% utang AS diberikan oleh Cina, yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi (Syahrin, 2018). Konsekuensinya, Cina menarik pinjamannya dari AS. Dengan kondisi yang ada saat ini bukan tidak mungkin Amerika Serikat kemudian berusaha memperluas dan meningkatkan kembali kegiatan ekonominya hampir di semua kawasan.

Persaingan tersebut terus mengakar dan menyulut beberapa peristiwa strategis dunia setelahnya. Selain persaingan dagang, terdapat beberapa peristiwa yang mendasari konflik kedua negara tersebut. Mulai dari pandemi covid-19 dimana Trump menyebutnya sebagai “virus Cina” dan menganggap RRC tidak transparan, kemudian demonstrasi pro-demokrasi di

Hongkong, Permasalahan Uyghur, Nuklir Korea Utara, konflik Huawei dengan otoritas AS, dan terakhir yang juga masih memanas ialah konflik multilateral di wilayah Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan kemudian menjadi studi kasus yang menarik. Peralannya, konflik teritorial tersebut banyak melibatkan beberapa negara seperti Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Yang menarik, terdapat beberapa negara dalam aspek tertentu sebelumnya saling menguatkan hubungan diplomatik seperti halnya Vietnam dengan Cina, pada prosesnya kemudian menyeberang ke AS perlahan akibat konflik Laut Cina Selatan. Di sisi lain, beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand yang sebelumnya memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, akibat memanasnya kondisi politik internal dan kepentingan perdagangan, pada prosesnya kemudian juga membuka diri terhadap Cina. Tak terkecuali dengan Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mulai condong ke arah Cina terutama dalam hal kebijakan ekonomi dalam negeri yang melibatkan kerjasama bilateral. Seperti disebutkan oleh Hart and McRae (2015), *"Indonesia's relationship with China has been subject to sharp shifts, and while Indonesia seeks to benefit from closer economic relations with an economically rising China, the rise also underscores a persistent wariness in Indonesia that is likely to remain a limiting factor in the bilateral relationship"*.

Sementara itu, menurut Hart and McRae (2015), Indonesia juga masih menjalin hubungan baik dengan pemerintah Amerika Serikat dan berencana mengembangkan hubungan bilateral diantara keduanya, seperti dijelaskan berikut: *"Since independence, Indonesia has maintained a relatively cooperative and mutually supportive relationship with the United States. The current security partnership is limited by Indonesia's current operating and strategic capacities, and a desire to maintain a diverse range of cooperative relationships"*.

Kondisi tersebut membuat Indonesia terjebak dalam posisi *proxy war*. Perang *proxy* sendiri merupakan perang antar negara atau aktor non-negara (seperti kelompok pemberontak atau terror), yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Pihak lain tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan lama dengan pihak yang bertikai baik dalam bentuk pendanaan,

pelatihan militer, dan lain-lain yang dapat memastikan perang terus berjalan. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proksi, aktor non-negara kekerasan, dan tentara bayaran, pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan. (Nurdin, Angga Rachmat: 2015)

Dalam konsep *in-out groups* dan rivalitas terdapat hipotesis tentang kohesi dan sentralisasi. *"The cohesion hypothesis posits that external state threats increase political cohesion within a domestic population. The centralization hypothesis speculates that external threats facilitate state centralization, thereby expanding government capacities"*. Ancaman teritorial eksternal membuat publik menjadi kurang toleran terhadap nonkonformis grup dan juga memfasilitasi negara menjadi sentralistik dengan alasan memperisapkan menghadapi dampak dan ancaman dari rivalitas teritorial (Bak, Chavez, and Rider, 2020).

Asumsi teoritik tersebut bisa dipahami dalam konteks Indonesia dalam menghadapi rivalitas AS-China karena Indonesia menerapkan politik bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya. Meski demikian, rivalitas dua negara adidaya tersebut pasti memiliki implikasi terhadap kedaulatan bangsa baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tulisan ini mencoba menganalisa, sekaligus berusaha melakukan upaya *forecasting*, tentang sejauh mana implikasi yang ditimbulkan bagi kedaulatan NKRI bertolak dari konflik dua negara besar tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset studi literatur dengan menelaah berbagai sumber literatur mulai dari jurnal, *textbook*, hingga dokumen-dokumen publikasi lainnya terkait pembahasan konflik laut Cina Selatan, historisitas Cina dan Amerika Serikat, data aktual mengenai pertumbuhan ekonomi dan sosial kedua negara, serta sumber primer dan sekunder pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menakar Kedalaman Konflik AS-China

Rivalitas dua negara adidaya, mengacu pada fakta historis, memperlihatkan bahwa fenomena tersebut meninggalkan dampak ketidakstabilan geopolitik global. Sebut saja kebangkitan Jerman pada akhir abad ke 19 pasca manuver Otto van Bismarck hingga kepemimpinan fasisme Adolf Hitler dimana rivalitas nya dengan AS menghasilkan perang besar selama dua gelombang. Terakhir, AS juga bersitegang dengan Uni Soviet dalam perang dingin. Persaingan pengaruh kapitalisme-demokrasi dan komunisme bahkan masih menyisakan sisa-sisa dampak pada kontestasi politik kontemporer.

Kebangkitan Cina pada akhir tahun 1970an hingga tahun 2000 seakan tidak memberikan napas sama sekali bagi Amerika Serikat untuk duduk nyaman sebagai raja utama dan terakhir di kontestasi politik ekonomi global. Tidak ada pengecualian bagi kebangkitan Cina, kebangkitan Cina juga disinyalir akan menyulut gejolak geopolitik kawasan (Layne, 2008).

Terdapat fenomena kontradiktif dalam hubungan AS dan Cina yang sejatinya membedakannya dengan konflik AS dan Uni Soviet. Saat friksi dengan Uni Soviet, AS secara terbuka memperlihatkan perbedaan kepentingan yang sangat menonjol bahkan hingga aspek ideologis. Namun dalam kasus dengan Cina, AS dan Cina memiliki hubungan diplomatik resmi berlandaskan kepercayaan dan sikap saling menghormati (Bendini, 2016). Di sisi lain, AS menganggap Cina sebagai mitra strategis dalam ekonomi khususnya perdagangan, namun dari aspek keamanan, AS menganggap Cina merupakan perusak di area -yang selama ini AS anggap sebagai- pribadi, yakni kawasan asia-pasifik. Se jauh ini, Beijing belum secara terbuka mengumumkan negasi nya terhadap AS. Beijing sendiri menjalankan strategi “*safety play*” namun tetap perlahan mengikis kekuatan AS di berbagai negara berkembang dunia.

Seiring munculnya slogan “*Make America Great Again*” dan “*America First*” yang diusung oleh mantan presiden AS, Donald Trump, hal tersebut menandakan adanya upaya AS untuk mendapatkan (kembali) penghormatan dengan mewujudkan dominasi total atas semua negara. Untuk itu, AS mengkonsolidasikan pembangunan kekuatan politik internasional yang tidak dibatasi

oleh aturan internasional maupun kesepakatan aliansi-aliansi (Yuliantoro, 2016). Berangkat dari hal tersebutlah kemudian, strategi terbaru AS dalam *National Security Strategy (NSS)* mulai menyatakan secara terbuka bahwa Cina merupakan penjegal, penghalang, dan penantang kedigdayaan AS. Secara khusus, NSS mengklaim bahwa Cina berusaha menggeser pengaruh AS, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Kebijakan ini memutus pendekatan *soft power* yang sebelumnya dilakukan oleh Barack Obama.

Tarik menarik kepentingan perlahan menjadi sumber potensi konflik yang dapat meledak kapanpun. Maka dari itu, tidak lah berlebihan ketika para pakar menganggap bahwa Laut Cina Selatan merupakan medan perang masa depan.

Laut Cina Selatan: Pivot Point Rivalitas AS-Cina

Laut Cina Selatan dalam dekade ini menjadi salah satu zona panas dunia. Klaim RRC atas garis *Dash-9* yang menurut mereka adalah batas resmi dari wilayahnya menyulut konflik perbatasan dengan beberapa Negara ASEAN yang memiliki kepentingan yang sama di wilayah tersebut. Garis *Dash-9* adalah peta buatan Cina yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Partai Komunis yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok pada tahun 1949, kemudian membuat sembilan garis putus-putus (*nine dash lines*) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953. Sembilan garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Seperti, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina. (Tempo, 2016). Cina mengklaim bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang sudah tidak bisa ditawarkan kepemilikannya mengacu kepada pertimbangan historis. Bagi mereka, Cina telah menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan sejak masa Kaisar Wu dan Dinasti Han berkuasa pada abad 2 SM, dimana pemanfaatan wilayah tersebut dieksplorasi untuk kepentingan militer, ekonomi, serta

pengembangan ilmu pengetahuan (Dam, 2010).

Saat ini, Laut China Selatan secara geografis menjadi salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan wilayah Pasifik dengan wilayah di barat (India, Timur Tengah, Afrika) dan juga selatan (Indonesia dan Australia). Selain merupakan jalur pelayaran penting, komoditas sumberdaya alam yang terkandung di wilayah Laut China Selatan juga merupakan salah satu komoditas penting kenapa penguasaan wilayah tersebut diperebutkan oleh banyak Negara. Laut China Selatan sendiri diprediksi memiliki kandungan cadangan minyak sekitar 17,7 Miliar ton dan juga cadangan gas alam sekitar 900 Triliun kubik (Angkasa, 2013).

Senada dengan data di atas, Cina mengklaim melalui risetnya bahwa di dalam Laut Cina Selatan, terdapat cadangan minyak lebih dari 213 miliar barel, atau dengan kata lain sebesar 10 kali lipat cadangan minyak milik Amerika Serikat. Pun halnya *Energy Information Administration (EIA)* menginformasikan bahwa cadangan terbesar tersebut selain minyak mentah, juga terdapat gas alam yang kuantitasnya sama dengan cadangan minyak milik Qatar dengan perhitungan sebesar 900 kaki kubik. (Roza, Nainggolan, & Muhammad, 2013).

Dengan cadangan mineral sebanyak itu, wilayah Laut China Selatan, khususnya daerah kepulauan Spratly menjadi tempat cadangan minyak terbesar keempat dunia. Belum lagi sumber daya kelautan lainnya seperti ikan dan juga potensi wisata bahari yang menggiurkan, membuat wilayah ini kini menjadi ajang rebutan negara-negara yang memiliki kepentingan disana.

Seiring dengan godaan sumber potensi tersebut, eskalasi konflik di hampir 20 terakhir juga mengalami kenaikan walaupun konflik Laut Cina Selatan masih masuk pada kategori rendah dari aspek potensi konflik. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa gesekan terbuka di perairan hingga di arbitrase internasional. Saling cegat kapal patroli. Cina kemudian mengajukan peta *nine dash lines* kepada PBB pada tahun 2009, namun ditentang oleh Filipina, Malaysia, hingga Indonesia. Per tahun 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah terhadap Laut Cina Selatan. Namun selepas Duterte memimpin Filipina, protes tersebut melunak. Hal tersebut juga diikuti oleh negara-negara tetangga. Thailand bahkan lebih membuka diri terhadap

Cina pasca keterbukaannya kerap dikritik oleh Barat. Ditambah, Cina merupakan mitra dagang potensial negara-negara ASEAN pasca CAFTA.

Disisi lain, selain mendapat pertentangan dari Negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan, klaim RRC atas Garis Dash-9 ini juga mendapat tentangan dari Negara-negara barat yang memiliki kepentingan di wilayah Pasifik. Amerika Serikat juga bahkan terlibat dalam gesekan tersebut. AS dengan sekutunya merespon klaim RRC ini dengan melakukan patroli bersama Negara sahabat di wilayah Laut China Selatan dengan misi bertajuk #FreeAndOpenIndoPacific dengan tujuan menjaga kebebasan bernavigasi di kawasan Laut China Selatan.

Mau tidak mau, AS sejatinya perlu memilih di antara dua pilihan dilematis, yakni fokus pada kepentingan domestik atau fokus pada keunggulan militer di Kawasan tersebut. Gesekan dengan Cina di Laut Cina Selatan jelas menjadi tidak terelakkan karena Cina mengedepankan kepentingan nasionalnya, yakni klaim teritorial Laut Cina Selatan (juga timur). Pada akhirnya, AS juga terseret karena kepentingan nasional Cina menabrak batas-batas maritim negara aliansi AS di Kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, Cina berupaya menciptakan kekuatan Angkatan laut yang mampu menyaingi Angkatan Laut AS dan negara aliansinya. Kontrol atas wilayah maritime yang diperebutkan ini juga pada akhirnya menyebabkan peningkatan ketegangan dengan AS (Bendini, 2016).

Beberapa kali Cina telah menunjukkan *psy war* guna mengendalikan Laut Cina Selatan dengan melakukan reklamasi atau pembangunan pulau buatserta pembangunan pangkalan militer baru di wilayah tersebut. Cina melihat nilai strategis wilayah Laut Cina Selatan sebagai sarana untuk mencegah strategi pengepungan AS. Klaim ini dapat menimbulkan berbagai ketegangan tidak hanya dengan AS tetapi juga akan membahayakan hubungan Cina dengan negara tetangganya. Klaim teritorial ini menyiratkan adanya tabrakan kepentingan langsung dengan beberapa sekutu terdekat

**Implikasi Rivalitas Amerika Serikat – Republik Rakyat China Terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia
(Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)
(Rendy Adiwilaga, Prasta Kusumah, Mustabsyrotul Ummah Mustofa)**

AS di kawasan, seperti Jepang, Filipina, dan Korea Selatan (Bendini, 2016).

Laut Cina Selatan dan Timur kini menjadi *flashpoint* kawasan yang telah menyebabkan hubungan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara semakin menegangkan, khususnya Filipina, Jepang, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kontestasi keamanan dan hukum yang terus berlanjut serta keterlibatan pihak ketiga menjadikan Laut Cina Selatan menjadi kawasan 'konflik masa depan' (Yang & Li, 2016).

Implikasi Ketegangan Kawasan Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia

Pertentangan Antara dua kubu antara RRC dan juga Negara-negara yang kontra dengan kebijakan *Nine Dash Line* China, termasuk Amerika ini menjadi *concern* terhadap masalah pertahanan Indonesia. Indonesia secara langsung memiliki perbatasan dengan kawasan Laut China Selatan. Selain memiliki kepentingan dengan Laut China Selatan, posisi Indonesia yang strategis karena menjadi "*Choke Point*" Antara kawasan Pasifik dengan kawasan Samudra Hindia menjadikan Indonesia sebagai suatu Negara penting dimana kawasan lautnya menjadi akses strategis penghubung kedua samudera tersebut.

Indonesia sendiri membuka tiga buah jalur lintas pelayaran yang dinamakan dengan ALKI. ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional (UNCLOS). Penetapan ALKI sendiri sudah diatur oleh pemerintah melalui PP Nomor 37 Tahun 2002, dengan titik-titik koordinat ALKI yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut. (Kurnia, 2017)

Indonesia telah menetapkan tiga ALKI yang menghubungkan Samudra Hindia di bagian Selatan dengan Samudera Pasifik dan Laut China Selatan dibagian Utara. ALKI-1 menghubungkan Laut China Selatan dan Samudera Hindia yang melintasi beberapa wilayah perairan yaitu Selat Sunda, Selat Karimata, hingga Laut Natuna. ALKI-2 menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia dengan melintasi Selat Lombok, Laut Jawa, Selat Makasar, Hingga Laut Sulawesi. Sedangkan ALKI-3 menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia dengan melintasi Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Seram (Kurnia, Aan: 2017: 53-54).

Penetapan ALKI ini merupakan bentuk

dari pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai Negara kepulauan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran bagi seluruh umat manusia di wilayah perairan territorialnya. Disamping memiliki ALKI, perairan Indonesia juga memiliki banyak selat di dalam wilayah lautnya. Dari sekian banyak selat, bisa jadi selat Malaka, selat Lombok, selat Makasar dan selat Sunda yang menjadi salah satu "*Hot Zone*" perairan Indonesia karena di beberapa selat ini banyak sekali kapal, baik kapal niaga maupun kapal perang dari berbagai Negara yang sering ikut melintas. Apalagi di selat Malaka, selat tersebut sudah dicap sebagai salah satu jalur pelayaran yang sangat penting di dunia, sama pentingnya seperti terusan Suez dan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan Antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta menghubungkan wilayah ASEAN, Pasifik Timur, India, dan Timur Tengah.

Karena padatnya lalu lintas pelayaran dan penerbangan asing yang melintas di kawasan Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat seperti di wilayah selat Malaka dan ALKI-1, wilayah ini memiliki potensi tingkat ancaman yang cukup tinggi. Apalagi setelah semakin memanasnya kawasan Laut Cina Selatan, frekuensi kapal dan pesawat terbang militer Negara asing seperti Amerika Serikat dan RRC sering melintas dikawasan ini. Beberapa waktu lalu malah sempat dua Kapal Induk Amerika, USS Nimitz (CVN-68) dan USS Theodore Roosevelt (CVN-71) sempat melintas dikawasan perairan Indonesia. Kapal-kapal survey dari angkatan laut RRC juga diketahui pernah beberapa kali sempat ikut melintas di wilayah ALKI-1.

Kemudian, di wilayah Pasifik Timur khususnya Laut Cina Selatan, Amerika Serikat mengoperasikan satu Armada Tempur Angkatan Laut mereka, US 7th Fleet yang bermarkas di Jepang. Sedangkan dari pihak RRC, mereka juga mengoperasikan Armada Selatan mereka yang kini sudah diperkuat oleh salah satu kapal induk terbaru mereka, Shandong (17) yang beroperasi di Laut China Selatan. Angkatan Laut RRC memang sudah mengoperasikan dua unit kapal induk mereka, Liaoning (16), dan

Shandong (17). Mereka juga sedang menunggu kehadiran kapal induk ketiga mereka yang diprediksi akan segera uji laut beberapa waktu lagi.

Menghadapi ancaman ini, Amerika Serikat berencana untuk mengaktifkan kembali satu Armada Laut mereka, US 1st Fleet yang rencananya akan beroperasi di wilayah antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena itu kekuatan US 1st Fleet ini kemungkinan besar akan ditempatkan Singapura, apalagi Changi Naval Port memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk menampung kapal-kapal besar Amerika Serikat termasuk kapal induk mereka. (Khan, 2021).

Meningkatnya persaingan militer Antara Amerika Serikat dan RRC juga menimbulkan pola ancaman baru terhadap sistem pertahanan Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara dikawasan ASEAN yang memiliki perbatasan langsung dengan Laut China Selatan, ditambah lagi Indonesia yang merupakan Negara netral menjadi Negara yang berada dipusaran konflik Antara kedua Negara tersebut. Netralitas ini membuat kedua Negara besar tersebut terus berusaha menanamkan pengaruh yang luas di Indonesia. RRC dengan kekuatan ekonominya terus menawarkan bantuan investasi keuangan kepada Indonesia. Di sisi lain Amerika dengan kekuatan industri militernya yang kuat menawarkan bantuan kerja sama militer dengan memberikan penawaran akuisisi terhadap peralatan tempur canggih terbaru dari Amerika Serikat seperti, F-15EX Strike Eagle, F-16V Viper, hingga pesawat tiltrotor MV-22 Osprey.

Masing-masing Negara yang memberikan bantuan ini memiliki efek tersendiri. Dalam perspektif Geopolitik dan Geostrategi, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Kondisi Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam konflik Laut China Selatan dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi ibu pertiwi ini menjadikan Indonesia target incaran banyak Negara untuk menanamkan pengaruhnya disini. Amerika Serikat dan RRC sudah sendiri melakukan investasi-investasi mereka di Indonesia dengan cara nya masing-masing. Datangnya banyak pengaruh asing ini menjadi hal yang harus dicermati oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan strategis guna mempertankan kedaulatan Indonesia sebagai salah satu Negara netral di kawasan Asia-Pasifik.

Ancaman pengaruh tersebut bisa terus berkembang menjadi sebuah ancaman perang proxy apabila situasi di kawasan Laut China Selatan semakin memanas. Ancaman perang proxy bukan semata prediksi, namun memang nyata adanya. Di Timur Tengah misalnya, terjadi perang proxy di beberapa Negara paska terjadinya peristiwa *Arab Spring*. Di Suriah, konflik kepentingan Antara pemerintah Bashar Al-Assad dengan sekutunya Rusia, melawan kelompok oposisi FSA yang didukung oleh Turki dan kekuatan Barat lainnya seperti Amerika dan Perancis. Kemelut konflik di Timur Tengah juga menjadi semakin “runyam” ketika kelompok ekstrimis, seperti ISIS ikut terjun kedalam konflik di Timur Tengah.

Melihat realitas tersebut, ancaman *proxy war* memang menghantui berbagai Negara. Apalagi di Negara dengan letak dan sumberdaya nya yang strategis seperti Indonesia. Bila salah langkah, Indonesia bisa terjebak diantara *proxy war* antara dua kepentingan besar yang bermain dalam kasus konflik di Laut Cina Selatan, Antara Amerika dan RRC. Apalagi kedua Negara sudah mulai menanamkan “investasi” nya di Indonesia. Selain di Indonesia, Amerika Serikat sendiri malah lebih agresif dengan menjalin banyak kerjasama militer dengan Negara lainnya di ASEAN yang telah menjadi sekutunya seperti Singapura dan Filipina. Lebih dalam lagi, Amerika Serikat sendiri malah menjalin hubungan yang semakin mesra dengan mantan musuhnya yakni Vietnam. Wacana tersebut semakin mengemuka paska rencana kunjungan wakil presiden AS, Kamala Harris, ke Singapura dan Vietnam dengan agenda khusus pembahasan perihal keamana global, tanggap covid-19, perubahan iklim, dan promosi aturan yang dirumuskan untuk diimplementasikan dunia internasional. Bahkan, menguat pula wacana bahwa kunjungan kenegaraan Harris ditujukan untuk menggalang dukungan internasional dalam rangka menangkal pengaruh Cina yang semakin besar (Sekarwati, 2021).

Banyaknya Negara ASEAN yang memiliki keterikatan dengan Negara-negara barat yang dinilai memiliki musuh bersama secara politis geografis, yaitu RRC,

**Implikasi Rivalitas Amerika Serikat – Republik Rakyat China Terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia
(Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)
(Rendy Adiwilaga, Prasta Kusumah, Mustabsyrotul Ummah Mustofa)**

menjadikan RRC juga mencari mitra strategis yang bisa mendukungnya ketika kelak terjadi konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan. Berbeda dengan Negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, Indonesia merupakan salah satu Negara netral yang tidak memiliki perjanjian aliansi pertahanan dengan Negara barat, seperti Amerika Serikat. Karena netralitas inilah Indonesia menjadi salah satu Negara yang berpotensi menjadi mitra RRC ini, mengingat posisi Indonesia yang strategis, ditambah Indonesia merupakan Negara yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan RRC. RRC sendiri telah menanamkan banyak investasi mereka di Indonesia, seperti contoh proyek pembangunan kereta cepat Bandung – Jakarta yang berada dibawah naungan PT KCIC.

Harmonisnya hubungan Antara RRC dan Indonesia sendiri menjadi sorotan Negara Barat termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar di Indonesia, termasuk pengelolaan tambang yang dilakukan oleh PT Freeport di Papua. Issue Papua ini juga menjadi salah satu ancaman, dimana *proxy war* di Indonesia bisa saja meledak disana. Dalam menanggapi ekspansi pengaruh RRC yang makin bergerak ke Selatan, Amerika Serikat sendiri melakukan langkah antisipasi untuk melindungi kepentingannya di Indonesia, khususnya di Papua. Sebagai contoh, mereka mendirikan pangkalan Marinir baru di wilayah Darwin, Australia Utara yang memiliki jarak sangat dekat dengan pulau Papua. Satu brigade tempur marinir Amerika berkekuatan tempur sekitar 2500 pasukan telah ditempatkan di pangkalan udara Darwin sejak tahun 2012 silam.

Selain mengirimkan Marinir ke Australia, Negara Barat juga memainkan taktik politis nya yang bisa menjadi kartu ancaman bagi terciptanya *proxy war* di Indonesia. Sebagai contoh lagi, aktivis Organisasi Papua Merdeka, banyak yang mendapat suaka di negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Inggris dan Australia. Mereka memainkan banyak peran politis dikancah Internasional yang mengkampanyekan bahwa ada “penjajahan” yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ditengah Papua. Ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan NKRI, karena bila Negara-negara barat mendukung secara aktif para aktivis OPM tersebut, Papua sendiri bisa dilanda destabilisasi yang sangat hebat. Implikasinya paling berat adalah Indonesia bisa kehilangan wilayah Papua, dimana kehilangan ini akan memicu

destabilisasi politik yang lebih besar di Jakarta. Kehilangan wilayah Papua akan memicu kejadian tahun 1999 terulang kembali ketika presiden BJ Habibie harus turun dari jabatannya setelah kehilangan wilayah Timor Leste. Hilangnya Papua juga disinyalir akan menghidupkan lagi asa merdeka dari beberapa wilayah yang rawan terjadinya gerakan separatisme seperti di Maluku Selatan dan juga Aceh.

Ancaman proxy juga tidak datang dari daratan Papua. Bila terjadi perang proxy di Indonesia, ancaman juga bisa tercipta dari beberapa Ormas Keagamaan yang menjadi oposan pemerintah. Bahkan, beberapa waktu lalu pernah terjadi kasus dimana ada staff kedutaan besar Jerman, yang dicurigai sebagai agen intelijen Jerman, BND, terpantau sedang mengunjungi sebuah markas besar Ormas Keagamaan di daerah Petamburan, Jakarta. Issue politik konflik Antara agama dan komunis bisa saja dimainkan kembali apabila perang proxy di Indonesia ingin dilakukan. Apalagi, RRC merupakan salah satu simbol Negara dengan ideologi Komunis yang masih tersisa di Dunia saat ini. Investasi dalam bentuk apapun oleh pemerintah RRC, akan ditanggapi oleh simpatisan organisasi keagamaan tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia kepada ideologi komunisme.

SIMPULAN

Implikasi dari rivalitas AS-Cina terhadap Kedaulatan Indonesia harus mendapat perhatian secara serius. *Proxy war* merupakan ancaman nyata dan paling hegemonik sebagai implikasi dari konflik dingin dua negara besar seperti AS dan Cina. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus bisa memainkan perannya dengan baik agar netralitas Indonesia bisa tetap terjaga dan terhindar dari ancaman perang Proxy ini. *Si Vis Pacem Parabellum*, Indonesia harus siap berperang apabila ingin damai. Siap perang disini dimaksudkan adalah, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang kuat dan dapat mendukung aktivitas diplomasi Indonesia dikancah Internasional yang bisa menjaga netralitas Negara ini dan terhindar dari ancaman perang *proxy*.

**Implikasi Rivalitas Amerika Serikat – Republik Rakyat China Terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia
(Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)
(Rendy Adiwilaga, Prasta Kusumah, Mustabsyrotul Ummah Mustofa)**

Indonesia juga harus mempunyai semacam "buku putih" pertahanan yang *realible* dan juga berbasis ancaman *real-time*. Sejauh ini, walau sudah ada acuan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan minimum *essential force* terhadap kekuatan TNI sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia, namun seiring bergantinya rezim dan menteri pertahanan kebijakan pengembangan sistem pertahanan sering tidak diestafetkan kepada suksesor selanjutnya. Hal ini juga menjadi lampu kuning terhadap fokus pembangunan pertahanan Indonesia, apalagi ditengah kancah pertarungan "perang dingin" antara Amerika dengan Republik Rakyat China, diisi juga dengan pengembangan teknologi pertahanan yang semakin maju. Berkembangnya teknologi persenjataan, khususnya perkembangan teknologi militer antara Amerika dan China dapat menyebabkan apa yang dinamakan *Revolution of Military Affair (RMA)*. RMA ini sendiri nantinya berimplikasi terhadap revolusi taktik dan strategi pertahanan sebuah negara.

Apalagi kedua negara ini dinilai sedang agresif dalam melakukan riset teknologi pertahanan. Sebagai contoh, pemerintah China mengklaim bahwa industri pertahanannya sudah mampu membuat pesawat tempur dengan teknologi siluman yang diklasifikasikan sebagai penempur generasi ke-5, yang diberi kode J-20 *Mighty Dragon* dan J-31 *Gyrfalcon*. Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang terlebih dahulu memiliki teknologi ini dengan pesawat tempur F-22 Raptor dan kini diteruskan oleh F-35 Lightning II yang juga dieksport ke beberapa negara sahabat menjadikan teknologi pesawat siluman kini tidak lagi dimonopoli oleh Amerika Serikat saja, namun negara lain juga bisa dan sudah memiliki teknologi ini dalam sistem pertahanan negaranya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, khususnya dibidang pertahanan ini lah yang harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman terjadinya konflik di wilayah Laut China Selatan dan juga perang proxy yang menjadi ancaman nyata dalam sistem pertahanan Indonesia.

Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalannya dibidang pertahanan, baik dari kualitas maupun kuantitas sistem pertahanannya karena pola ancaman terus berkembang dan semakin nyata. Sejarah mencatat, destabilisasi sebuah Negara termasuk pelengseran rezim

penguasanya, termasuk di Indonesia dan banyak Negara berkembang lainnya terjadi karena sebagian disebabkan oleh kegagalan penguasanya membaca tuntutan perubahan issue politik yang terjadi di lingkup eksternal dan internal Negeranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bak, Daehee. Chavez, Kerry. and Rider, Toby. 2020. Domestic Political Consequences of International Rivalry. *Journal of Conflict Resolution* 2020, Vol. 64(4) 703-728 ^a The Author(s) 2019. Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions. DOI: 10.1177/0022002719876349 journals.sagepub.com/home/jcr
- Bendini, Roberto. 2016. United States - China Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation. Directorate General for External Policies Policy Department, European Union.
- Dam, Syamsumar. 2010. Politik Kelautan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Chappy. 2011. Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan. Red & White Publishing.
- Hamilton-Hart, Natasha and McRae, Dave. 2015. INDONESIA: BALANCING THE UNITED STATES AND CHINA, AIMING FOR INDEPENDENCE. United States Studies Centre. The University of Sydney
- Khan, Wajahat. 2021. *Resurrecting 1st Fleet: US Navy explores Indian Ocean options*. Diakses di <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Resurrecting-1st-Fleet-US-Navy-explores-Indian-Ocean-options> pada 12 Juli 2021
- Kurnia, Aan. 2017. *Between Threats & Opportunitites: Di Antara Ancaman & Peluang*; Petroenergy.
- Layne, Christopher. 2008. *China's Challenge to US Hegemony*. Current History. Januari.
- Mantolas, Sammy. 2016. "Cina dan Ramalan Bonaparte". Diakses di <https://tirto.id/cina-dan-ramalan->

Implikasi Rivalitas Amerika Serikat – Republik Rakyat China Terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan) (Rendy Adiwilaga, Prasta Kusumah, Mustabsyirotul Ummah Mustofa)

- [bonaparte-bJ6m](#), pada 12 Juli 2021.
- Nurdin, Angga Rachmat. 2015. *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Wawan H. 2011. *TNI & Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan*. CMB Press
- Majalah Angkasa. 2013. "Kekuatan Laut Di Asia Pasifik". Jakarta: Kompas Gramedia
- Majalah Angkasa. 2014. "Lomba Senjata Di Asia Pasifik". Jakarta: Kompas Gramedia
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Nurdin, Angga Rachmat. 2015. *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*.
- Roza, R, Nainggolan, P. & Muhammad S.V. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR.
- Sekarwati, Suci. 2021. "Alasan Kunjungan Kemala Harris ke Vietnam". Diakses di <https://dunia.tempo.co/read/1489344/alasan-kunjungan-kerja-kamala-harris-ke-vietnam/full&view=ok> pada 1 Agustus 2021
- Syahrin, M. Najeri. *China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik*. *Global & Strategis*, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018
- Yuliantoro, Nur Rachmat. Et al. 2016. "Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat". *Jurnal Hubungan Internasional*, 5 (2):193-209